

LPPI Universitas Al-Qolam Malang Jurnal Pusaka (2024) Vol.14 No.1 : 71 - 79 p-ISSN 2339-2215 | e-ISSN 2580-4642

© JP 2024

# PENGELOLAAN POTENSI WISATA SUMBER MARON BERBASIS SYARIAH DI PAGELARAN, MALANG

<sup>1</sup> Fatkhul Wahab Universitas Al-Qolam, Malang

<sup>1</sup> ftwahab@alqolam.ac.id

Received : 24-03-2024 | Revised : 27-05-2024 | Accepted : 13-06-2024

#### **Abstract**

The Sumber Maron Tourism Object is managed by Karangsuko BUMdes. Sumber Maron Tourism is semi-autonomous, that is, it has the authority to regulate and develop it. Sumber Maron Tourism Object has a positive impact on the community in improving the economy such as opening stalls, shops and parking. This situation certainly raises a problem, namely competition between them. This research is to find out how the management of Sumber Maron Tourism is a descriptive qualitative research. Data sources include primary sources, namely the village head and his staff, the Sumber Maron tourism manager, and secondary data sources, namely relevant journals and books. Data collection, namely interviews, observations and documents. The results of the study, that Sumber Maron Tourism provides employment to the community. The association was formed, namely the association of traders, parking and motorcycle taxis. Facilities include swimming spots, snorkelling, playing in waterfalls, flying fox, river tubing, PLTMH, toilets, prayer rooms, parking, stalls, shops, tire rental, changing rooms. Sumber Maron Tourism Manager involves the community and economic actors to ensure that tourism objects are not used as places of immorality and prohibit shops and stalls from selling alcohol in these attractions

**Key words**: management; sharia; eco-tourism; community improvement; society

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor unggul dalam mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di suatu daerah. Pariwisata yang terdapat di suatu daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan industri pariwisata merupakan suatu keharusan di masa sekarang. Banyaknya pengembangan industri pariwisata dapat dilihat dari pesona alam, sejarah dan budaya.

Pariwisata di suatu daerah menjadi andalan bagi daerah sebagai sumber pendapatan utama disamping pendapatan yang lain. Banyak daerah yang mengembangkan potensi alam daerahnya sebagai tempat wisata. Potensi yang dulunya tidak disentuh sekarang mulai mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah setempat. Pemanfaatan potensi alam tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah setempat, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan wisata harus berbasiskan pada pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, di mana pengelola yakni pemerintah daerah setempat harus memiliki visi dan misi dalam pengelolaannya. Pengelolaan wisata harus memiliki dua tujuan yaitu: (1) sebagai pemasukan bagi pemerintah setempat, (2) untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun pengelolaan wisata harus dikelola secara *syar'i* dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang relijius, pelestarian ekosistem dan lingkungan di sekitarnya, sehingga memberikan dampak yang positif baik bagi penunjung, masyarakat setempat dan pengelola.

Dalam rangka pengelolaan kawasan wisata berbasis masyarakat, perlu dikembangkan prinsip-prinsip dasar yaitu *prinsip co-ownership* (kawasan wisata adalah milik bersama untuk itu hak-hak masyarakat harus diakui); *prinsip co-operation* (kepemilikan bersama membawa konsekuensi bahwa pengelolaan dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat atau *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah masyarakat dan organisasi non pemerintah yang harus bekerja sama); dan *prinsip co-responsibility* (keberadaan kawasan wisata menjadi tanggung jawab bersama).

Tiga prinsip mendasar tersebut perlu dijadikan landasan strategis dalam pengembangan pariwisata yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu agar kawasan wisata tetap lestari. Kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh masyarakat lokal dari aktivitas pariwisata berkelanjutan adalah peluang usaha lokal baru dan penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang layak, daya tarik wisata dan penciptaan pasar, daya tarik wisata dan penciptaan pasar, daya tarik investasi, jejaring usaha, dan pajak pendapatan.

Penciptaan peluang usaha baru seperti misalnya pariwisata, akomodasi, transportasi dan energi ramah lingkungan karena efisiensi energi dan air serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, pusat pembelajaran dan budaya, penguatan pendapatan untuk ekonomi setempat agar menjadi lebih swasembada, mengurangi kebocoran dan memperkuat mata rantai produksi setempat. Terciptanya berbagai tempat kerja yang berkualitas karena pekerjaan layak yang ramah lingkungan meningkatkan kemakmuran dan daya beli penduduk, membantu mengurangi kemiskinan dan berbagai konsumsi masuk kembali ke dalam ekonomi local. Destinasi pariwisata yang dikelola secara baik dapat menarik wisatawan yang lebih berkualitas dan mampu menjangkau kelompok sasaran dari berbagai

sumber pasar, di mana praktik industrinya tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan, melainkan lebih berkontribusi kepada keberlanjutan.

Konservasi sumber daya jangka panjang, pembangunan masyarakat lokal dan infrastruktur yang baik menjamin lingkungan usaha yang baik saat ini dan untuk masa mendatang, yang membuat destinasi menjadi lebih menarik lagi bagi investor, dan dalam waktu yang bersamaan membantu konversi mengkonversi kekayaan pusaka masyarakat lokal. Efek berganda yang kuat dapat terlihat dalam sektor pariwisata melalui pengeluaran wisatawan untuk berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi, seperti pemandu wisata, restoran, toko kerajinan, transportasi lokal dan barang-barang seperti jasa lainnya baik dalam sektor ekonomi formal maupun informal. Usaha legal yang memenuhi kewajiban fiskal dan hukum merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah yang selanjutan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan.

Salah satu bentuk wisata yang mulai banyak diminati oleh pengunjung adalah wisata alam sumber mata air. Wisata yang berupa sumber mata air ini salah satunya adalah wisata sumber mata air yang ada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Wisata Sumber Maron pada awalnya merupakan pengelolaan air bersih. Namun sejak tahun 2012, Sumber Maron mulai dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata baru. Sejak tahun 2015, tempat wisata ini mulai dikenal luas hingga sekarang ini dan pengunjungnya lebih dari 500 orang setiap harinya.

Sumber Maron sebagai destinasi wisata memberikan harapan besar bagi masyarakat masyarakat Desa Karangsuko untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya baik melalui berdagang, parkir atau rumahnya menjadi *home stay* bagi pengunjung. Beranjak dari pemikiran di atas, peneliti berusaha mengkaji penelitian ini secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang massif terkait dengan pengelolaan wisata Sumber Maron sebagai sarana dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus pada wisata Sumber Maron desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu (1) Sumber Data Primer meliputi kepala desa dan jajarannya, pengelola, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis di wisata Sumber Maron. (2) Sumber Data Sekunder yaitu dari jurnal, buku, yang relevan. Teknk pengumpulan data meliputi yaitu: (1), Interview (wawancara) (2), observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data secara riil terhadap informan (3), dan teknik dokumenter.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mata Air Sumber Maron

Sumber Maron pada tahun 2005 mendapatkan bantuan dari World Bank (Bank Dunia) melalui program pemberdayaan desa yaitu *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC) atau Program Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin. Desa yang masuk kriteria program tersebut adalah desa yang memiliki potensi sumber daya terutama air yang melimpah namun belum bisa

dimanfaatkan secara optimal. Penelitian kemudian dilakukan untuk menguji kuantitas dan kualitas air Sumber Maron. Hasil penelitian air Sumber Maron layak untuk didistribusikan dan dimanfaatkan sebagai air minum dan air bersih. World Bank memberikan bantuan 50% untuk pembangunan pengelolaan air dan 50% sisa untuk pembangunan diperoleh dari hasil swadaya masyarakat. Pembangunan diawali dengan penanaman pompa air di bawah sumber dan pembangunan 3 tandon. Pompa air tersebut kemudian mengalirkan air ke 3 tandon yang berada di atas. Air di tandon selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Sumber Maron kemudian kembali mendapatkan program pada bulan September tahun 2011. Program tersebut adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di sekitar sumber.

Sumber Maron dulunya bukanlah tempat wisata melainkan sebuah sumber yang tidak dikelola dan airnya di manfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci,dan sebagainya. Pemanfaatan air tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di dekat sumber. Air sumber pada waktu itu melimpah, namun karena letak sumber yang berada di bawah dan tidak adanya teknologi yang memadai seperti saat ini menjadi penyebab air sumber tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kondisi tersebut juga menyebabkan kelangkaan air bersih, beberapa RT di Desa Karangsuko dan pengairan sawah warga Desa arangsuko yang tidak bisa memanfaatkan air sumber.

Rendahnya ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, membuat masyarakat berpikir ulang untuk mendapatkan tambahan pendapatan atau pun pekerjaan yang layak. Salah satunya menggali potensi pariwiswata yang ada di daerah masing-masing. Pengembangan pariwisata nantinya berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi. Upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Diharapkan pengembangan atau pembangunan pariwisata dapat berpengaruh baik bagi masyarakat dan mampu mendorong pengembangan sektor lain baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian maka, pengembangan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika, dan sosial terhadap masyarakat.

Pengembangan Wisata Sumber Maron menjadi salah satu indikator pemerataan pembangunan melalui percepatan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Ditinjau dari pariwisata ini berbasis pada potensi lokal sebagai keunggulan dan identitas dasar, maka secara efektif dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing sebagai pancapaian pendapatan berkelanjutan. Inilah yang menjadikan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan wisata terebut.

Seiring dengan berkembangnya wisata Sumber Maron, masyarakat mulai memanfaatkan Sumber Maron sebagai tempat pencaharian baru. Seperti banyaknya pedagang di sepanjang kawasan Sumber Maron sampai di sepanjang aliran sungai Sumber Maron. Barang yang dijual bervariasi mulai dari makanan ringan, penyewaan ban, toilet berbayar, souvenir, dan lain sebagainya.

Pengelolaan Sumber Maron sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat, berawal dari ide Bapak Kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Said yang melihat kondisi masyarakatnya yang memprihatikn karena kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Mayoritas mereka menggunakan air yang digunakan

untuk irigasi dan ditampung dalam kolam. Sementara mata air Sumber Maron yang ada di Desa Karangsuko hanya 15 persen masyarakat yang memanfaatkannya yaitu masyarakat yang ada di sekitar Sumber Maron tersebut.

Ide Bapak Said ini, selanjutnya ditindak lanjuti dengan mengirimkan proposal ke Dinas kesehatan dan Dinas pengairan. Ada sekitar 40 proposal dari 11 desa yang masuk ke kedua instansi tersebut. Dari kedua proposal yang dikirimkan ke Dinas kesehatan dan Dinas pengairan, Dinas kesehatan yang memberikan respon dan memberi bantuan untuk pengelolaan Sumber Maron sebagai sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Karangsuko.

Pada tahun 2005 pengelolaan air bersih Sumber Maron di desa Karangsuko ini mendapatkan bantuan dari World Bank (Bank Dunia) melalui program pemberdayaan desa yaitu *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC). Desa yang masuk kriteria program bantuan ini adalah desa yang memiliki potensi sumber daya terutama air yang melimpah namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal. *Water and Sanitation for Low Income Communities* (WSLIC) selanjutnya diganti dengan Himpunan Pengusaha Air Minum (HIPAM) dan sanitasi warga.

Pembangunan diawali dengan penanaman pompa air di bawah sumber dan pembangunan 3 tandon. Pompa air tersebut kemudian mengalirkan air ke 3 tandon yang berada di atas. Air di tandon selanjutnya didistribusikan ke masyarakat. Pada bulan September tahun 2011, Sumber Maron kembali mendapat program bantuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

# Pengelolaan Obyek Wisata Sumber Maron

Pengelolaan Sumber Maron bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam yang berupa sumber mata air yang selama ini dibiarkan dan hanya sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkannya dan hanya terbatas untuk mandi dan mencuci. Padahal Sumber Maron sebagai mata sumber air memiliki potensi besar baik dari segi kualitas air maupun panorama alamnya. Pengelolaan Sumber Maron sebagai pengadaan air bersih maupun sebagai wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes Amanah) Karangsuko yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangsuko. BUMdes Amanah ini mengelola HIPAM dan Sanitasi Warga, dan wisata Sumber Maron yang berbasis syariah yang memberikan kenyaman dan rasa aman bagi pengunjung untuk berwisata di Sumber Maron. Pengelolaan HIPAM dan sanitasi dan wisata Sumber Maron tidak melibatkan investor dari luar ataupun saham dari masyarakat setempat tetapi murni dari pemerintah desa Karangsuko.

Pengeloaan wisata Sumber Maron yang berbasis syariah ini menekankan agar para penjual menjual barang-barang yang halal dan bukan barang-barang yang haram terutama minuman keras. Disamping itu, pelibatan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menjaga agar tempat wisata ini tidak dijadikan sebagai tempat perbuatan maksiat.

Untuk keselamatan pengunjung, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati. Ini bertujuan untuk meminalisir hal-hal yang tidak inginkan seperti kecelakaan pada saat bermain atau memanfaatkan wahana yang ada. Peraturan-peraturan ini tidak hanya dalam bentuk papan-papan pengumuman, tetapi juga disiarkan melalui pengeras suara, agar pengunjung mentaati peraturan. Di samping itu, disediakan

posko-posko kesehatan dan tim sar sehingga apabila terjadi kecelakaan dapat tertangani dengan cepat, dan apabila perlu dirujuk ke rumah sakit maka dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu lama.

HIPAM dan Sanitasi Warga maupun wisata Sumber Maron keduanya merupakan unit otonomi dari BUMdes Amanah dimana keduanya memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkannya. Untuk HIPAM hingga kini ada sekitar 2700 pelanggan yang tersebar di empat desa yaitu Karangsuko, Brongkal, Sukosari dan Panggungrejo. Sedangkan untuk sanitasi dikhususkan untuk warga Karangsuko.

Dengan adanya BUMdes Amanah yang membawahi HIPAM dan Sanitas Warga, dan wisata Sumber Maron memberikan dampak positif yaitu lapangan pekerjaan bagi masyarakat Karangsuko baik sebagai karyawan di sektor HIPAM dan Sanitasi Warga, wisata maupun sebagai pelaku ekonomi seperti toko, warung, parkir, penyewaan ban, distributor, home stay dan lain-lain.

Sumber Maron sebagai obyek wisata yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat di desa Karangsuko di mana mereka sebelumnya bekerja sebagai buruh tani atau bekerja pekerjaan tidak tetap. Dengan adanya obyek wisata Sumber Maron ini, sebagian dari masyarakat desa Karangsuko tidak lagi bekerja sebagai buruh. Mereka bekerja baik sebagai tukang parkir, penjual dan lain-lain. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Terdapat tiga paguyuban di obyek wisata ini yaitu paguyupan parkir, pedagang dan ojek. Pelaku ekonomi di ketiga paguyuban ini merupakan warga desa Karangsuko. Ketiga paguyuban ini berada di bawah pengelolaan wisata Sumber Maron, namun tidak ada pajak bagi ketiga paguyuban tersebut hanya iuran bulan yang dikumpulkan kepada ketua paguyuban untuk kegiatan-kegiatan bersama yang diadakan di Sumber Maron.

Sumber Maron sebagai obyek wisata pengelolaannya dilaksanakan secara maksimal agar para pengunjung tidak merasa kecewa. Oleh karena itu, pengelolaan Sumber Maron tidak hanya sebagai tempat refresing bagi pengunjung, namun sebagai obyek wisata yang bersifat edukasi, hal ini karena di Sumber Maron terdapat tenaga pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Meskipun skalanya kecil, hidro pembangkit listrik ini dapat memberikan pemahaman kepada pengunjung terutama kepada para siswa untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya pembangkit tenaga listrik ini, tenaga listrik di Sumber Maron digunakan untuk pengelolaan air bersih yaikni HIPAM dan sanitasi warga.

Pengelola wisata Sumber Maron sebagai bagian unit dari Badan Usaha Milik desa (BUMdes Amanah) dalam pengelolaannya baik secara manajemen maupun keuangan bersifat otonomi. Penyetoran pendapatan dari sektor wisata ini dilakukan setiap bulan ke BUMdes Amanah Karangsuko setelah dikurangi pajak sebesar 20 persen, operasional dan gaji karyawan.

Untuk pengembangan ke depan, difokuskan kepada akses menuju ke tempat wisata Sumber Maron tersebut mengingat akses hanya melalui dua jalur yang sempit yang digunakan untuk jalan keluar masuk, akibatnya ketika musim libur kedua akses tersebut penuh sesak antara pengunjung yang keluar dan masuk. Pada hari-hari libur pengunjung ke wisata Sumber Maron biasa membludak terutama pada

libur hari raya yang bias mencapai 5.000 pengunjung lebih, sedangkan pada hari-hari biasa hanya sekitar seribu pengunjung.

# Pariwisata Syariah

Adapun pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya. Namun istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi yaitu kunjungan kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja tetapi ada perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata Ssariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata syariah berlaku semua tempat kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat Muslim harus berIslam di manapun dan kapanpun.

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di muka bumi, sehingga dapat belajar untuk bersyukur dan memperbaiki kualitas iman. Wisata syariah meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga empat perbelanjaan dan persinggahan.

# Karakteristik Parawisata Syariah

Menurut Chukaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran parawisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi kareakteristik tersendiri yaitu: (1) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan, (2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam, (3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam, (4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, (5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal, (6)Layanan transportasi harus memiliki keamanan system proteksi, (7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan, (8) Bepergian ketempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam

Dari karakteristik tersebut, terdapat empat tempat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang parawisata suatu syariah, yakni lokasi: penetapan sistem islami di area parawisata. Lokasi parawisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan, transportasi: penerapan transportasi, seperti pemisahan tempat duduk antara lakilaki dan perempuan yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya *syariat* Islam dan terjaga kenyamanan wisatawan, konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan di sini baik dari segi sifatnya, perolehannya maupun pengelolaannya, dan hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan dan minuman tetapi juga fasilitas yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Karakteristik wisata syariah juga meliputi sejumlah ciri khas yang membedakannya dari jenis wisata lainnya. Salah satu karakteristik utama dari wisata syariah adalah penyediaan fasilitas dan layanan

yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup penyediaan makanan dan minuman halal, serta hotel atau tempat tinggal yang difasilitasi dengan perangkat ibadah seperti mushola atau tempat sholat. Selain itu, wisata syariah menekankan pada penggunaan pakaian yang sopan dan sesuai dengan adab Islam, serta menolak aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, seperti judi atau minum-minuman keras. Wisata syariah juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dan unik, seperti wisata budaya dan sejarah, serta pesona keindahan alam yang ramah lingkungan. Selain itu, wisata syariah menekankan pada kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan wisata. Minat terhadap wisata syariah harus di dijawab dan turut mengembangkan usaha wisata syariah sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional.

# Penyelenggaranaan Pariwisata Syariah

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaranaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Muhammad Afdi Nizar berpendapat bahwa ada dua hal yang membangun adanya hubungan antara pariwisata dan ekonomi, yakni: pariwisata berdampak pada ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, berpengaruh terhadap pendapatan, neraca pembayaran, penerimaan devisa dari beberapa hal, seperti belanja wisatawan, pembangunan pariwisata, impor maupun ekspor barang dan lain-lain; pariwisata dapat menjadi efek stimulus bagi produk-produk tertentu dan dapat membentuk komunitas-komunitas yang diharapkan hal tersebut dapat menggerakkan ekonomi daerah ke arah yang positif dengan diciptakannya lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan bagi daerah.

Pembangunan pariwisata di Indonesia berlandaskan asas manfaat yang berkehidupan dalam keseimbangan sebagaimana diamanatkan UU No.9 tahun 1990 pasal 2, yang menyatakan bahwa pembangunan objek dan daya tarik wisata bukan hanya memperhatikan nilai kehidupan ekonomi-sosial-budaya, melainkan juga memperhatikan kelestarian budaya dan kualitas lingkungan hidup, serta keberlangsungan usaha parawisata itu sendiri.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wisata Sumber Maron merupakan salah satu unit bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Amanah di desa Karangsuko. Dalam pengelolaan Wisata Sumber Maron terdapat pengurusan tersendiri yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Pengelolaan Wisata Sumber Maron bersifat otonomi di mana pengurus Wisata Sumber Maron memiliki kewenangan untuk mengelola secara maksimal.

Wisata Sumber Maron memberikan dampak positif bagi warga Karangsuko yaitu lapangan pekerjaan. Baik sebagai karyawan maupun pelaku disektor ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangsuko. Untuk menertibkan pelaku di sektor ekonomi, pengelola wisata Sumber Maron ini membentuk kelompok yang dinamakan paguyuban yang meliputi: paguyuban pedagang, paguyuban parkir dan paguyuban ojek. Dengan adanya paguyuban ini, maka persaingan tidak sehat di antara pelaku ekonomi dapat dihindarkan.

Adapun fasilitas-fasilitas yang terdapat di Wisata Sumber Maron meliputi: Tempat Berenang, Snorkelling, Bermain di bawah air terjun, Flying fox, River Tubing, PLTMH, Toilet, Musholla, area parkir, warung, toko, penyewaan ban dan ruang ganti. Sebagai obyek wisata yang berbasis syariah, pengelola Wisata Sumber Maron melibatkan masyarakat setempat termasuk para pelaku disektor ekonomi untuk menjaga agar obyek wisata yang memberikan kehidupan kepada masyarakat banyak tidak dijadikan sebagai tempat maksiat. Selain itu para penjual toko atau warung agar tidak menyediakan minuman keras yang berdampak negative kepada obyek wisata ini.

# 5. RUJUKAN

Arif Mardani, Frida Purwanti, Siti Rudiyanti. "STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU PAHAWANG PROPINSI LAMPUNG." JOURNAL OF MAQUARES 6 (22017) : 1–9.

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/article/view/19804.

Eddyono, Yohanes Sulistyadi dan Fauzi. Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyaraka. 1st ed. Bandar lampung: AURA, 2017.

Khotimah, Achmad Fawaid dan Juzrotul. "PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP **WISATA SYARIAH** TOURISM) **PULAU SANTEN KABUPATEN** (HALAL DI BANYUWANGI." Jurnal Al **BANJARI** 18 (2019): 89. https://doi.org/10.18592/albanjari.v18i1.2532.

Muhammad. Pengantar Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Murni1, Ernimulia, Yuli Ifana Sari, and Akhmad Faruq Hamdani. "Analisis Pengembangan Wisata Sumber Maron Berbasis Masyarakat Di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang." In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen, 3. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2019. <a href="https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index">https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index</a>.

Nafi'ah, Zahrotun, Danisa Thalita Laras Ayu, and Raden Arvin Praja Kurniawan. "Kapitalisasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas(Studikasus Wisata Sumber Maron Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)." Journal of Governance Innovation 2 (2020): 72–73. <a href="https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.370">https://doi.org/https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.370</a>.

- Nasrulloh, Elfira Maya Adiba, Muhammad Nur Efendi. "Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Bank Syariah." Jurnal Muslim Heritage 8 (2023): 80. https://doi.org/DOI: 10.21154/muslimheritage.v8i1.4989.
- Nouvanda Hamdan Saputram , Lusi Kholisiah, Erda Nuraini. "Potensi Dan Prospek Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah(Studi Kasus: Kota Bandung)." Journal Of Business And Entrepreneurship 1 (2019): 96. https://doi.org/https://doi.org/10.54268/baskara.v1i2.5699.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi, and Achmad Zurohman. "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0." EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah 2 (2020): 279. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160.
- Nurfajrina, Puspa. "Sistem Pengembangan Wisata Sumber Maron Dengan Sustainable Livelihood Approach (Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 5 (2016): 3. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4091.
- Pratiwi, Ade Ela. "Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta." Jurnal Media Wisata 14 (2016): 349. http://jurnal.ampta.ac.id/Index.Php/MWS/Article/View/246/193.
- Presiden dan DPR. "UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan." Jakarta, 2019.
- Wahyuni, Titi. "Wisata Syariah Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal (Studi Kasus Di Daerah Istimawa Yogyakartadan Jawa Tengah)." Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, AndCreative Economy 1 (2021): 160. https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4348.